The Impact of Village Expansion on the Socioeconomic Life of the Community in Rempek Darussalam Village

Dampak Pemekaran Desa terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rempek Darussalam

Zhul Fachri*, Rispawati, Basariah, L. Sumardi

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia

Email: 1fahrizhul649@gmail.com, 2ripa64@gmail.com, 3basyariah@unram.ac.id,
4lalusumardi.fkip@unram.ac.id

Correspondence: fahrizhul649@gmail.com

Abstract

Village expansion is an administrative policy that aims to accelerate public services and equitable development, this research is directed at five aspects, namely income distribution, type of work, level of education, housing conditions, and wealth ownership, the method used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis technique uses qualitative data analysis techniques with the steps of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that in terms of income distribution, although there was a general increase in income, in addition, village expansion had a positive impact on the variety of types of work in the community, with the emergence of new job opportunities in the Government and trade sectors, on the other hand, the level of community education tended to increase along with the increase in education facilities, and housing conditions experienced improvements, marked by an increase in the quality of buildings and access to basic facilities. In addition, community wealth ownership has increased, both in the form of productive and consumptive assets. Overall, village expansion contributed significantly to the improvement of the community's standard of living.

Keywords: Village expansion, socio-economic, employment, education, housing, assets, Rempek Darussalam.

Abstrak

Pemekaran desa merupakan kebijakan administratif yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik serta pemerataan pembangunan, penelitian ini diarahkan pada lima aspek yaitu distribusi pendapatan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, dan kepemilikan kekayaan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal distribusi pendapatan, meskipun terjadi peningkatan pendapatan secara umum, selain itu pemekaran desa membawa dampak positif terhadap variasi jenis pekerjaan masyarakat, dengan munculnya peluang kerja baru di sektor Pemerintahan maupun perdagangan, disisi lain tingkat pendidikan masyarakat cenderung meningkat seiring bertambahnya fasilitas Pendidikan, serta kondisi perumahan mengalami perbaikan, ditandai dengan peningkatan kualitas bangunan dan akses terhadap sarana dasar. Selain itu, juga kepemilikan kekayaan masyarakat menunjukkan peningkatan, baik dalam

bentuk aset produktif maupun konsumtif. Secara keseluruhan, pemekaran desa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kata Kunci : Pemekaran desa, sosial ekonomi, jenis pekerjaan, pendidikan, perumahan, kekayaan, Rempek Darussalam.

1. PENDAHULUAN

Pemekaran desa merupakan upaya administratif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terutama di wilayah, melalui pemekaran, diharapkan kapasitas pemerintahan dapat lebih efektif dalam menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung, dalam konteks pedesaan (Guswari et al., 2025), pemekaran desa diharapkan mampu mendekatkan akses pelayanan serta membuka peluang pembangunan yang lebih merata (Hoar et al., 2021).

Dalam pelaksanaan pemekaran desa tentu terdapat banyak kendala, selain itu ada juga dampak yang diakibatkan dari proses pemekaran desa tersebut, yakni ada positif dan negatif bagi masyarakat desa itu sendiri. Dampak negatif tersebut belakangan ini banyak muncul kasus-kasus yang melibatkan aparat desa, terkait dengan penggunaan dana yang diberikan pada masing-masing desa (Muslih, 2020).

Salah satu desa yang mengalami pemekaran adalah Desa Rempek Darussalam yang terbentuk dari wilayah administrasi Desa Rempek Induk. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah baru, meskipun pemekaran tersebut telah berjalan, pertanyaan mendasar ialah sejauh mana kebijakan itu berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Rempek Darussalam.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemekaran desa telah membawa berbagai perubahan baik itu dari segi sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik, akan tetapi dampak nyata dari pemekaran tersebut terhadap taraf hidup masyarakat masih belum banyak diteliti secara mendalam, hal ini menjadi penting untuk diketahui agar kebijakan serupa dapat berjalan dengan lebih tepat sasaran di wilayah lain.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menelaah dampak pemekaran desa Rempek Darussalam dengan fokus pada lima aspek utama: distribusi pendapatan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, dan kepemilikan kekayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemekaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain dampak negatif terdapat juga dampak positif yang banyak dirasakan oleh masyarakat yang telah mengalami pemekaran desa. Dampak positifnya banyak sekali setelah melakukan pemekaran yakni masyarakat jadi bisa menikmati pemerataan, baik dari segi pembangunan, pemberdayaan, infrastruktur, pendidikan, maupun ekonomi dan lain sebagainya (Harahap, 2015). Salah satu desa yang merasakan atau mengalami dampak positif dari pemekaran desa itu adalah Desa Rempek Darussalam. Desa Rempek Darussalam ini mekar sekitar tahun 2020 dari Desa Rempek.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Januari 2023 di Desa Rempek Darussalam, ditemukan bahwa setelah mengalami pemekaran Desa Rempek Darussalam mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan masih gabung dengan Desa Rempek, salah satu kemajuan Desa Rempek Darussalam yang dirasakan, yakni terbangunnya infrastruktur. Studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan wawancara bersama salah seorang tokoh yang berinisial M, menyatakan bahwa setelah Desa Rempek Darussalam mekar, perubahan mulai terlihat, seperti pembangunan jalan di pelosok dusun, pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan, dan jangkauan air bersih sudah dirasakan. Sebelumnya sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Setelah mekar menjadi desa baru, masyarakat juga memiliki akses yang baik dalam mendistribusikan hasil kebunnya dengan langsung membawa ke pasar.

Berdasarkan paparan permasalahan yang diuraikan, maka akan dilakukan kajian mendalam melalui penelitian dengan judul “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rempek Darussalam”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hal tersebut karena pada penelitian ini berisi berbagai rangkaian proses penelitian yang telah

dirancang secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskripsi atau kata dan gambar, dimana data yang disajikan selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman kepada orang lain atau untuk mencapai tujuan tertentu (Sugiyono & Kuantitatif, 2009). Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study) dimana pada penelitian ini fokus pada penyidikan suatu peristiwa, fenomena, kejadian atau kasus yang diteliti dengan cara mengumpulkan berbagai informasi untuk kemudian diolah sebagai langkah penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi akan atau mengenai bidang tertentu.

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian umumnya teknik mengumpulkan data melalui beberapa teknik: observasi (observation), wawancara (Interview), dan dokumentasi (Sukardi, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri dari; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi data. Dimana, triangulasi data merupakan proses peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan sekaligus menguji kredibilitas atau keabsahan data yang telah dikumpulkan. Dalam melakukan triangulasi data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan teknik, dan triangulasi dengan waktu (Fathoni, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengetahui Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rempek Darusslam, peneliti mengamati dua rumusan masalah yang ada dan mendeskripsikannya dalam bentuk uraian dan mengumpulkan data dengan menerapkan tiga tehnik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui wawancara dengan subjek dan informan penelitian serta hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperoleh data mengenai Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rempek Darussalam

3.1 Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rempek Darussalam, yakni melalui beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Distribusi Pendapatan

Dalam hal distribusi pendapatan setelah pemekaran pendapatan masyarakat mendapati peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum pemekaran, karena ketika sebelum pemekaran terdapat banyaknya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti sulitnya lapangan pekerjaan, akses infrastruktur tidak memadai, dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun sebaliknya dengan pemekaran terdapatnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, serta adanya program penunjang dari pemerintah desa untuk meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat lewat pembagian ternak kambing dan pembagian bibit tumbuhan.

Gambar 3. Pembagian BLT

Gambar 4. Pembagian Beras

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemekaran desa di Desa Rempek Darussalam telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pendapatan keluarga di desa tersebut. Sebelumnya, banyak keluarga yang tidak menerima bantuan sosial apapun. Namun setelah pemekaran, berbagai program bantuan mulai diberikan kepada masyarakat, seperti Sembako, Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini membantu keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang sebelumnya tidak tersedia.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori pembangunan ekonomi (Economic Development Theory) yang dikemukakan oleh Rostow (1960), dalam teori ini, pemekaran desa bisa dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan lokal dan memperbaiki distribusi sumber daya, termasuk pendapatan. Pemekaran desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan, tetapi bisa mempengaruhi distribusi pendapatan antara wilayah yang baru dan yang lama (Alam, 2025).

Menurut Sahrul (2022) pemekaran desa berperan penting dalam memperbaiki distribusi pendapatan antar masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan adanya desa baru, alokasi anggaran dari pemerintah pusat, seperti Dana Desa, menjadi lebih tersebar dan merata. Hal ini memungkinkan desa-desa hasil pemekaran untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokalnya sendiri, sehingga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi warganya.

2. Jenis Pekerjaan

Pemekaran desa cukup memberikan dampak yang baik bagi pekerjaan masyarakat, yang dimana dengan pemekaran desa pekerjaan masyarakat menjadi bervariasi. Sebelumnya masyarakat hanya terpaku pada satu jenis pekerjaan saja, seperti berkebun dan berternak, sedangkan semenjak pemekaran masyarakat dapat memperoleh jenis pekerjaan lain seperti peluang menjadi perangkat desa, peluang lembaga desa, bekerja diproyek/konstruksi, adanya UMKM dan sebagian masyarakat disini banyak yang lolos P3K. Dalam hal ini masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Gambar 5. Perangkat Desa

Gambar 6. Lembaga Desa

Di sektor pemerintahan, banyak kesempatan pekerjaan yang terbuka, seperti Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun), serta anggota Lembaga Desa seperti BPD, LPM, Karang Taruna, RT, PKK, dan BUMDes. Hal ini memberikan masyarakat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan terstruktur, yang sebelumnya tidak ada atau terbatas.

Sejalan dengan Husein (2020), pemekaran desa juga memfasilitasi perpindahan pekerjaan bagi beberapa individu, seperti banyaknya guru honorer yang kini diangkat menjadi guru P3K. Secara keseluruhan, pemekaran desa telah memberikan dampak positif bagi perubahan jenis pekerjaan di Desa Rempek Darussalam, memberikan variasi peluang kerja yang lebih luas.

Sejalan dengan pandangan Pangestu (2015), dalam pembangunan ekonomi regional dan kebijakan pemerataan antara tantangan dan peluang menurut pangestu pemekaran desa yang didukung dengan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal dapat mendorong perubahan jenis pekerjaan yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini terutama berlaku jika desa baru berhasil memanfaatkan potensi sektor non-pertanian.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam hal ini, tingkat pendidikan masyarakat disini memberikan dampak yang cukup baik pasca pemekaran desa, karena semenjak pemekaran sarana pendidikan bertambah. Sehingga totalnya sarana pendidikan terdapat disetiap dusun di Desa Rempek Darussalam. Mengingat hal tersebut sehingga masyarakat menjadi mudah dalam menyekolahkan anaknya dalam menerima kebutuhan anak terhadap pendidikan. Di sisi lain fasilitas dan infrastruktur jalan juga sangat menunjang dalam menopang gairah/semangat masyarakat dalam bersekolah dan menyekolahkan anak-anaknya, karena dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai masyarakat jadi mudah dalam mengakses pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia terjadi peningkatan di Desa Rempek Darussalam.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah pemekaran desa, akses pendidikan di Desa Rempek Darussalam mengalami perkembangan yang pesat. Tumbuhnya beberapa yayasan pendidikan di desa ini, selain sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan.

Gambar 1. Pembukaan Jalan

Sebelum pemekaran akses pendidikan di desa masih terbatas dan jarang, baik dari segi fasilitas maupun jangkauan. Namun setelah pemekaran, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai telah mempermudah masyarakat untuk mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat merasa tidak ada lagi hambatan dalam memperoleh pendidikan, dan akses pendidikan menjadi lebih mudah dan lebih baik.

Pandangan terkait dampak pemekaran desa terhadap peningkatan pendidikan sejalan dengan teori pembangunan manusia (Human Development Theory) yang dikembangkan oleh Amartya dan Mahbub (Suryawati, 2005), menurutnya dalam konteks pemekaran desa, teori ini mengemukakan bahwa pemekaran desa dapat meningkatkan fokus pada pendidikan lokal dan memberi peluang bagi peningkatan fasilitas pendidikan. Dengan pemekaran, desa baru sering kali mendapatkan anggaran dan perhatian lebih besar dalam pengembangan pendidikan. Namun perubahan ini bergantung pada kebijakan lokal yang mendukung pembangunan sektor pendidikan di wilayah baru, yang memungkinkan peningkatan tingkat pendidikan masyarakat di desa tersebut.

4. Kondisi Perumahan

Berdasarkan hasil observasi kondisi perumahan yang ada di Desa Rempok Darussalam memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam keamanan dan kenyamanan, karena kondisi perumahan masyarakat setelah gempa 2018 dan pemekaran desa memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Desa Rempok Darussalam khususnya. Karena yang semulanya sebagian besar masyarakat hanya memiliki rumah kayu sederhana dan rumah tidak layak huni, yang sebelumnya juga sebagian besar rumah masyarakat hanya berdiam di dalam kebun dan sulitnya air bersih.

Sedangkan setelah gempa dan pemekaran hikmahnya, rumah masyarakat disana sama rata mendapatkan bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) dari pemerintah pusat dan warga mulai berbondong-bondong mendirikan rumah ke dalam gubuk-gubuk dan ke pinggir jalan dan mendapatkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah desa bagi masyarakat yang tidak mampu.

Setelah mekar juga kondisi kenyamanan dan keamanan rumah warga dapat dirasakan, karena dengan adanya air bersih, adanya infrastruktur gang-gang yang ada digubuk warga dan aktifnya satlinmas desa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dulu sebelum mekar warga masyarakat disini kesulitan air bersih dan

kesulitan akses gang yang ada dilingkungan mereka, dan juga sering terjadi kehilangan, seperti kehilangan barang-barang berupa peralatan rumah dan kehilangan ternak.

Pandangan terkait dampak pemekaran desa terhadap kondisi perumahan masyarakat sejalan dengan teori urbanisasi (*Urbanization Theory*) yang diungkapkan oleh Harvey (1973), menurutnya pemekaran desa dapat menciptakan permintaan baru untuk perumahan, terutama jika ada perubahan dalam pola kehidupan masyarakat yang mulai lebih terhubung dengan ekonomi dan aktivitas luar desa. Desa yang dimekarkan mungkin mulai menghadapi masalah perumahan yang lebih kompleks, seperti meningkatnya jumlah penduduk atau perubahan kebutuhan perumahan yang lebih terorganisir dan berbasis pada standar hidup yang lebih tinggi.

5. Kepemilikan Kekayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan kekayaan masyarakat Desa Rempek Darussalam setelah pemekaran dapat kita lihat dari kepemilikan alat transportasi, rata-rata masyarakat disana paling tidak dalam satu rumah tangga mempunyai 2-3 sepeda motor, belum lagi warga yang memiliki lahan perkebunan, rata-rata mereka mempunyai mobil carry/pickup. Kepemilikan kekayaan juga di tandai dengan asset rumah, pekarangan dan tanah, dan rata-rata masyarakat disini sukses dalam berkebun.

Gambar 2. Pembangunan Kantor Desa

Dari gambar 4.8 terlihat pemerintah Desa Rempek Darussalam melakukan kerja bakti bersama dalam rangka mempercepat pembangunan kantor Desa Rempek Darussalam, nantinya dengan diperbaharunya infrastruktur diharapkan dapat menunjang pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Pandangan terkait dampak pemekaran diatas sejalan dengan pandangan Pangestu (2015), menurutnya pemekaran desa yang di ikuti oleh kebijakan yang mendorong pengembangan potensi lokal dapat membantu menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memiliki kekayaan melalui peningkatan ekonomi lokal. Misalnya jika desa baru memiliki potensi wisata atau industri tertentu, maka distribusi kekayaan yang lebih merata dapat tercipta dengan memberikan akses kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor tersebut.

3.2 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rempek Darussalam Pasca Pemekaran Desa Rempek Darussalam

1. Faktor Pendukung

Diantara faktor pendukung pembangunan Desa Rempek Darussalam *Pertama* adalah pembangunan infrastruktur, hal ini berperan sangat penting dalam mendukung

kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, penyediaan air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya jalan yang baik, akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pasar menjadi lebih mudah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjual hasil pertanian atau produk lokal mereka. Selain itu, pembangunan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi yang memadai akan mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan produktivitas.

Kedua pelatihan dan pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong kemajuan sosial ekonomi di Desa Rempek Darussalam. Melalui pelatihan, masyarakat diberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas serta membuka peluang usaha baru. Pemberdayaan ini membantu masyarakat untuk lebih mandiri, tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga dapat mengembangkan potensi-potensi lainnya, seperti usaha kecil, kerajinan tangan, atau sektor pariwisata, tergantung pada potensi lokal desa.

Ketiga dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa, di Desa Rempek Darussalam, tokoh masyarakat dan pemerintah desa sangat berperan dalam mendukung perkembangan sosial ekonomi masyarakat pasca pemekaran. Tokoh masyarakat, seperti kepala desa, pemuka agama, dan tokoh adat, dan tokoh pemuda memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan motivasi kepada warga desa untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi (Rostow's Stages of Economic Growth) Menurut Walt Whitman Rostow, tahap awal pembangunan suatu wilayah adalah pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang produktivitas. Infrastruktur memungkinkan terciptanya akses pasar, mobilitas tenaga kerja, dan distribusi barang dan jasa, yang sangat penting dalam tahap "take-off" Pembangunan (Chandra et al., 2017).

2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat pembangunan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Rempek Darussalam, faktor itu dapat di bagi menjadi dua yaitu:

a) Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor internal yang menjadi penghambat pembangunan kehidupan sosial ekonomi pasaca pemekaran, *Pertama* keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan SDM berarti bahwa penduduk di desa ini mungkin belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk mengelola atau mengembangkan sumber daya yang ada. Hal ini bisa mencakup kekurangan tenaga kerja terampil atau rendahnya tingkat pendidikan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi atau mengembangkan usaha yang lebih produktif.

Kedua pola pikir yang kurang berkembang, pola pikir masyarakat desa yang mungkin masih terbatas pada tradisi atau cara-cara lama dalam menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi bisa memperlambat kemajuan. Jika masyarakat kurang terbuka terhadap perubahan atau inovasi, hal ini bisa menghambat pengembangan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Ketiga keterbatasan pendidikan, pendidikan yang kurang memadai di desa ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, mengembangkan keterampilan, dan beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat bisa memiliki peluang lebih besar untuk meraih pekerjaan yang lebih baik atau membuka usaha yang lebih berkembang.

Sejalan dengan Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan bukan semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan nasional, melainkan lebih dari itu, pembangunan adalah proses memperluas kapabilitas manusia. Kapabilitas ini merujuk pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting dan bermakna—baik itu dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki akses terhadap layanan kesehatan, atau kebebasan untuk memilih pekerjaan dan menjalani kehidupan sosial yang produktif. Menurut Sen, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara maksimal dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang sejati harus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar mengejar angka-angka ekonomi (Gumelar & Qomar, 2025).

b) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat pembangunan kehidupan sosial ekonomi pasca pemekaran yakni: *Pertama* infrastruktur yang masih kurang memadai, di Desa Rempek Darussalam faktor ini merujuk pada masih minimnya pembangunan fasilitas dasar yang mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Kondisi ini mencakup jalan-jalan yang rusak atau tidak terhubung dengan baik, sehingga menyulitkan akses transportasi untuk membawa hasil pertanian atau barang dagangan ke pasar. Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit yang memadai membuat pelayanan kesehatan terbatas, memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kedua keterbatasan anggaran keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah desa maupun daerah membuat sulit untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian. Tanpa dana yang cukup, proyek pengembangan infrastruktur, peningkatan pendidikan, atau program pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksana secara optimal.

Ketiga dampak dari bencana alam dan perubahan iklim, Desa Rempek Darussalam memiliki rentan terhadap bencana alam, seperti tanah longsor, atau yang terdampak oleh perubahan iklim, akan menghadapi kerugian ekonomi yang besar. Bencana alam seringkali merusak infrastruktur, rumah, dan lahan pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi hasil pertanian, yang menjadi sektor utama ekonomi di banyak desa, mengurangi produksi dan pendapatan masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan oleh Amartya bahwa pembangunan harus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kerentanan dan risiko, termasuk risiko bencana alam dan perubahan iklim (Suryawati, 2005)

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Desa Rempek Darussalam memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan distribusi pendapatan secara umum, diversifikasi jenis pekerjaan, serta bertambahnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan perbaikan kondisi perumahan. Selain itu, terjadi peningkatan kepemilikan aset produktif dan konsumtif yang mencerminkan tumbuhnya daya beli masyarakat.

Adapun faktor pendukung dalam proses pemekaran meliputi peran aktif pemerintah desa, ketersediaan lahan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain terbatasnya infrastruktur dasar,

rendahnya kapasitas aparatur desa baru, serta kendala koordinasi antar lembaga pemerintahan.

Dengan demikian, pemekaran desa dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan didukung oleh perencanaan yang matang dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemekaran wilayah yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan studi kebijakan publik dan pembangunan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, L. B. R. R. (2025). Empowering Batik Artisans in the Context of Modernization: A Case Study of Batik Gunawan Setiawan Industry. *Jurnal Prajaiswara*, 6(1), 443–447.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67–76.
- Fathoni, A. (2006). Metodologi penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 260–269.
- Guswari, R., Naidah, N., & Rasulong, I. (2025). Dampak Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur Terhadap Kemajuan Ekonomi Masyarakat Infrastruktur Daerah. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1231–1241.
- Harahap, S. A. W. (2015). Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *Perspektif*, 4(1).
- Harvey, K. L., & Martin, S. F. (1973). Ephemeral active regions. *Solar Physics*, 32, 389–402.
- Hoar, E. R., Mael, M. Y., & Festianto, D. (2021). Tuntutan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa Di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. *Jurnal Poros Politik*, 3(1), 8–18.
- Husein, M. Y., & Kharisma, F. (2020). Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Borneo Studies and Research*, 1(2), 1061–1067.
- muslih. (2020). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Journal of Social Politics and Governance E-ISSN 2685-8096 | P-ISSN 2686-0279 Vol.2 No., Vol.2*, 2686–0279.
- Pangestu, M., Rahardja, S., & Ing, L. Y. (2015). Fifty years of trade policy in Indonesia: New world trade, old treatments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 239–261.
- Sahrul, S., Primasari, S., & Jiwantara, F. A. (2022). Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1694–1701. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.606>
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Vii.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).